



Banyak SKPD Tidak Bisa

Susun Laporan Keuangan ke BPK

JOGJA - Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan sistem akuntansi pemerintahan. Hal itu menjadi standar pelaporan keuangan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat sejak 2005. Meski sudah hampir tiga tahun setelah ditetapkan, masih banyak SKPD di lingkungan

Pemkot Jogja yang belum bisa membuat laporan keuangan ke BPK sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Anggota BPK Perwakilan Provinsi DIJ Suwartomo mengatakan, sulitnya SKPD menyusun laporan keuangan karena laporan standar akuntansi pemerintahan membutuhkan keahlian khusus. "Makanya banyak SKPD yang belum siap," katanya, saat memberikan sambutan dalam

Gelar Pengawasan Daerah yang diselenggarakan Bawasda Kota Jogja kemarin.

Dikatakan, belum semua SKPD mempunyai pegawai berlatar belakang pendidikan akuntansi. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan kebijakan yang harus dipatuhi masing-masing SKPD. Oleh karenanya, BPK terus melakukan pendampingan pada tiap SKPD untuk menyusun laporan yang benar. (yog)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretaris Daerah	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 18 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005